Vol 13 No 1
Tahun 2009

KEK

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN

- **Program Restrukturisasi Mesin Industri Tekstil Indonesia: Sebuah Studi Kasus Kebijakan Subsidi Pemerintah**

- **Overview Atas Transparansi Fiskal Dalam Perspektif Risiko: Suatu Komparatif dan Studi Literatur**

- **Sustainbility Reporting For CSR Disclosures: A Case Study In Oil and Gas Industry**

- **Desentralisasi Fiskal dan Penciptaan Stabilitas Keuangan Daerah**

- **Analisis Kebijakan Pendanaan Penjaminan Simpanan Indonesia**

- Tulisan Lepas:
  Stabilitas Sistem Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dalam Rangka Mewujudkan Negara Kesejahteraan

ISSN 1410-3249

Pusat Kebijakan Ekonomi Makro
Badan Kebijakan Fiskal
Departemen Keuangan
Republik Indonesia

ISSN 1410-3249

KAJIAN

EKONOMI KEUANGAN

Pusat Kebijakan Ekonomi Makro
Badan Kebijakan Fiskal
Departemen Keuangan RI

- Program Restrukturisasi Mesin Industri Tekstil dan Produk Tekstil Indonesia: Sebuah Studi Kasus Kebijakan Subsidi Pemerintah
- Overview Atas Transparansi Fiskal Dalam Perspektif Risiko: Suatu Komparatif dan Studi Literatur
- Sustainability Reporting For CSR Disclosures: A Case Study In Oil and Gas Industry
- Desentralisasi Fiskal dan Penciptaan Stabilitas Keuangan Daerah
- Analisis Kebijakan Pendanaan Penjaminan Simpanan Indonesia
- Tulisan Lepas : Stabilitas Sistem Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan Dalam Rangka Mewujudkan Negara Kesejahteraan

Kaj. Eko. & Keu.	Vol. 13	No.1	Jakarta 2009	ISSN1410-3249

 ISSN 1410-3249

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kajian Ekonomi Keuangan pada volume kali ini dapat menjumpai pembaca sekalian. Edisi ini menyajikan berbagai topik yang beragam dan menarik dalam konteks perkembangan ekonomi dan keuangan.

Pada volume kali ini ada berbagai topik tulisan yaitu Program Restrukturisasi Mesin Industri Tekstil dan Produk Tekstil Indonesia: Sebuah Studi Kasus Kebijakan Subsidi Pemerintah, Overview Atas Transparansi Fiskal Dalam Perspektif Risiko: Suatu Komparatif dan Studi Literatur, *Sustainability Reporting For CSR Disclosures: A Case Study in Oil and Gas Industry*, Desentralisasi Fiskal dan Penciptaan Stabilitas Keuangan Daerah, Analisis Kebijakan Pendanaan Penjaminan Simpanan Indonesia, dan Tulisan Lepas: Stabilitas Sistem Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan Dalam Rangka Mewujudkan Negara Kesejahteraan. Adapun para penulis yang berkontribusi yaitu Sigit Setiawan, Joko Tri Haryanto, Ester Sri Astuti, Makhlani, Moudy Hermawan, Parulian Sihotang, Subagio Effendi, dan Muslimin B. Putra.

Demikianlah sekapur sirih yang bisa disampaikan oleh Dewan Redaksi. Ibarat peribahasa tiada gading yang tak retak, maka kami menyadari tulisan ini tentulah ada kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dari para pembaca guna perbaikan di masa yang akan datang. Selanjutnya, kami berharap Kajian ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca. Selamat membaca.

Jakarta, 2009
Dewan Redaksi

DAFTAR ISI

Cover

Dewan Redaksi ii

Sekapur Sirih v

Daftar Isi vii

Dafta Tabel viii

Daftar Gambar x

Abstraksi xi

Program Restrukturisasi Mesin Industri Tekstil dan Produk Tekstil Indonesia:
Sebuah Studi Kasus Kebijakan Subsidi Pemerintah
Oleh: Moudy Hermawan 1

Overview Atas Transparansi Fiskal Dalam Perspektif Risiko:
Suatu Komparatif dan Studi Literatur
Oleh: Makhlani 11

Sustainability Reporting For CSR Disclosures:
A Case Study In Oil and Gas Industry
Oleh: Parulian Sihotang and Subagio Effendi 31

Desentralisasi Fiskal dan Penciptaan Stabilitas Keuangan Daerah
Oleh: Joko Tri Haryanto dan Ester Sri Astuti 49

Analisis Kebijakan Pendanaan Penjaminan Simpanan Indonesia
Oleh: Sigit Setiawan 63

Tulisan Lepas : Stabilitas Sistem Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi
yang Berkelanjutan Dalam Rangka Mewujudkan Negara Kesejahteraan
Oleh: Muslimin B. Putra 81

DAFTAR TABEL

Program Restrukturisasi Mesin Industri Tekstil dan Produk Tekstil Indonesia: Sebuah Studi Kasus Kebijakan Subsidi Pemerintah

Tabel 1 Volume Ekspor-Impor Produk TPT (Ribu US $) 2
Tabel 2 Tiga besar sektor industri penyumbang Nilai Tambah Produksi (miliar rupiah) 3
Tabel 3 Peran ekspor product TPT 3
Tabel 4 Tingkat utilisasi kapasitas produksi (%) 4
Tabel 5 Realisasi investasi tiga sektor industri terbesar 4
Tabel 6 Perkembangan program TUFS 7
Tabel 7 Perbedaan Pembiayaan Industri Antara Indonesia dan India 7

Sustainability Reporting For CSR Disclosures: A Case Study In Oil and Gas Industry

Table 1 Characteristics of Sustainability Reporting (Gray et.al.,1986) 40
Table 2 Trend of Sustainability Reporting 2003-2005 (Sihotang and Margareth, *2008)* 40
Table 3 Sustainability Reporting Companies in Indonesia (IAMI,2008) 41
Table 4 Reporting Aspects Application Level for BP 42
Table 5 Reporting Aspects Application Level for Chevron 43
Table 6 Reporting Aspects Application Level for Exxon Mobil 44
Table 7 Reporting Aspects Application Level for Total 45
Table 8 Reporting Aspects Application Level for Medco Energi 46

Desentralisasi Fiskal dan Penciptaan Stabilitas Keuangan Daerah

Tabel 1 Instrumen Desentralisasi Fiskal Sisi Penerimaan 53
Tabel 2 Persamaan Desentralisasi Fiskal dan Stabilitas Makroekonomi 57

Analisis Kebijakan Pendanaan Penjaminan Simpanan Indonesia

Tabel 1 Daftar Negara-negara yang membentuk Sistem Penjaminan Simpanan Eksplisit dalam 10 tahun terakhir 66

Tabel 2 Periode dan Batas Maksimal Penjaminan 67
Tabel 3 Nama Bank Gagal (September) 2005 - 2007 68
Tabel 4 Negara-negara yang menerapkan pendekatan Ex Ante 69
Tabel 5 Negara-negara yang menerapkan kebijakan pendanaan Ex Post 70
Tabel 6 Negara-negara yang menerapkan kebijakan pendanaan Hibrid 71
Tabel 7 Perbandingan Sistem Premi Indonesia dengan Negara-Negara Lain Dalam Kelas Income yang Sama yang Memiliki Sistem Penjaminan Simpanan Eksplisit 72
Tabel 8 Kompilasi Analisis Perbandingan Pendekatan Ex Ante vs Ex Post 75

ISSN 1410-3249

Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol. 13 No. 1, 2009

DAFTAR GAMBAR

Overview Atas Transparansi Fiskal Dalam Perspektif Risiko:
Suatu Komparatif dan Studi Literatur

Gambar 1 Kerangka Model Risiko Ekonomi 21

Gambar 2 Kerangka model macrostress test 22

Sustainability Reporting For CSR Disclosures:
A Case Study In Oil and Gas Industry

Figure 1 Overview of GRI G3 Sustainability Reporting Guidelines (GRI) 47

Figure 2 Frequency of Sustainability Reporting Disclosures (Sihotang and Margareth, 2008) 47

Desentralisasi Fiskal dan Penciptaan Stabilitas Keuangan Daerah

Gambar 1 Pola Kewenangan dan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah di Era Desentralisasi Fiskal 49

MAJALAH KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN

ISSN 1410-3249

Volume 13 Nomor 1, 2009

Keywords used are free terms. Abstracts can be reproduced without permission or charge.

ABSTRAKSI

Hermawan, Moudy et. al. (Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Depkeu RI)

Program Restrukturisasi Mesin Industri Tekstil dan Produk Tekstil Indonesia: Sebuah Studi Kasus Kebijakan Subsidi Pemerintah

Kajian Ekonomi dan Keuangan Volume 13 Nomor 1, 2009, halaman 1-10

Subsidi yang sering dianggap distorsi dalam perekonomian, sebenarnya juga diperlukan sebagai sarana bagi pemerintah untuk membantu sektor-sektor potensial yang mendapat kesulitan untuk berkembang. Dalam hal Industri TPT yang sempat dipersepsikan sebagai *sunset industry,* terutama setelah banyaknya kredit macet pasca krisis moneter, sebenarnya menyimpan potensi ekonomi yang besar apabila pertumbuhannya tetap dijaga. Sebagai sektor yang berprestasi dalam menyumbangkan PDB, ekspor nonmigas, penggerak investasi dan penyerap tenaga kerja, ITPT yang saat ini sedang menghadapi problem lemahnya daya saing akibat rendahnya efisiensi produksi layak mendapat bantuan dari pemerintah melalui subsidi langsung yang ditransmisikan dengan tepat.

Kata kunci : Subsidi, TPT, ITPT, Pemerintah

Makhlani et. al. (Badan Kebijakan Fiskal, Departemen Keuangan RI)

Overview Atas Transparansi Fiskal Dalam Perspektif Risiko: Suatu Komparatif dan Studi Literatur

Kajian Ekonomi dan Keuangan Volume 13 Nomor 1, 2009, halaman 11-31

Untuk pertama kalinya, Pernyataan Risiko Fiskal (*Statement of Fiscal Risks*) diungkap dalam Nota Keuangan APBN 2008, sebagai praktek baru di bidang keuangan negara untuk menyatakan adanya risiko fiskal. Pengungkapan (*disclosure*) risiko fiskal sangat penting dilakukan, karena *awareness* terhadap bahaya ada risiko tersembunyi akan meningkat sehingga diharapkan otoritas fiskal akan mampu merespons dengan baik kemungkinan adanya ancaman terhadap ekonomi nasional pada tahun-tahun mendatang. Selanjutnya, dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan risiko fiskal, maka studi banding dan literatur merupakan suatu yang perlu dilakukan. Membandingkan praktek pengungkapan risiko fiskal dengan Australia, New Zealand, dan Brazil, dan mendalami literatur yang terkait dengan pengelolaan risiko fiskal akan memperoleh gambaran sejauh mana Indonesia telah melaksanakan *best practices and codes.* Terdapat 2 (dua) temuan penting yang patut dipelajari lebih lanjut yaitu Pernyataan Risiko Fiskal harus didasari

MAJALAH KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN

ISSN 1410-3249

Volume 13 Nomor 1, 2009

Keywords used are free terms. Abstracts can be reproduced without permission or charge.

ABSTRAKSI

peraturan perundangan yang kuat dan dapat mengikat semua pihak pencetus risiko (*contracting agencies*), dan ketiga negara tersebut di atas semakin mampu membagi dan memecah (*unbundling*) risiko.

Kata kunci : Risiko fiskal, APBN, transparansi

Sihotang, Parulian and Subagio Effendi et. al. (Departemen Keuangan)

Sustainability Reporting For CSR Disclosures: A Case Study In Oil and Gas Industry

Kajian Ekonomi dan Keuangan Volume 13 Nomor 1, 2009, halaman 33-49

Sustainability Reporting has been used quite extensively in communicating company accountability towards its broad-based stakeholders. The report, widely known as the triple bottom line (TBL) report, discloses three performance indicators of any company: economic, social and environmental performance. Social and environmental performance are usually understood as Corporate Social Responsibility (CSR).

This article will investigate how Sustainability Reporting principles developed by the Global Reporting Initiatives (GRI) have been implemented by the oil and gas industry in order to stimulate and enhance CSR practices and disclosures. GRI-based sustainability reporting is currently the most recognized reporting principles implemented by various industries worldwide.

Content analysis on selected Sustainability Reporting of selected international oil companies will be conducted to identify the extent to which their CSR practices and disclosures have been in line with GRI principles. Furthermore, this research will explore whether CSR reporting applied by international oil multinationals could be implemented in developing countries such as Indonesia.

Finally, it is expected that this exploratory research will be able to introduce and develop the Indonesian principles on CSR disclosures using GRI-based Sustainability Reporting published by the oil and gas companies operating in Indonesia.

Keywords : Corporate Social Responsibility, Disclosures, Sustainability Reporting, Oil and Gas Companies.

MAJALAH KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN

ISSN 1410-3249

Volume 13 Nomor 1, 2009

Keywords used are free terms. Abstracts can be reproduced without permission or charge.

ABSTRAKSI

Haryanto, Joko Tri dan Ester Sri Astuti et. al. (Departemen Keuangan)

Desentralisasi Fiskal dan Penciptaan Stabilitas Keuangan Daerah

Kajian Ekonomi dan Keuangan Volume 13 Nomor 1, 2009, halaman 51-65

Indonesia has been implemented decentralization era since 2001th in order to increasing local empowerment and local capability. During this period central government gave a all of the authority to the local government excepted authority for the political, finance,national defence, justice and religion. Beside gave the authority to the local government, central government also gave the source of the financing to the local government to meet the money follows function principle.

Financial stability is the most important things on the monetary area. Many theorytical background described that decentralization have relation with the local financial stability.Using statistic approach (panel data) we could be proved that decentralization have negative relation with the local financial stability and also the other variable such as population, GRDP, construction price index and volatility of money .

Key words : Financial stability, decentralization

Setiawan, Sigit et. al. (Badan Kebijakan Fiskal, Departemen Keuangan RI)

Analisis Kebijakan Pendanaan Penjaminan Simpanan Indonesia

Kajian Ekonomi dan Keuangan Volume 13 Nomor 1, 2009, halaman 51-65

Sistem penjaminan simpanan merupakan bagian tak terpisahkan dari jaring pengaman keuangan (*financial safety net*) suatu negara. Sistem ini dibentuk oleh berbagai kebijakan kunci yang salah satunya adalah kebijakan pendanaan penjaminan simpanan. Dalam tulisan ini dikaji kebijakan pendanaan yang berlaku saat ini, alternatif kebijakan lain, kelebihan dan kekurangan masing-masing kebijakan, serta rekomendasi guna menutup kelemahan kebijakan pendanaan penjaminan simpanan yang digunakan saat ini.

Dari sisi kebijakan tingkat premi, tingkat premi yang diterapkan oleh sistem penjaminan simpanan Indonesia saat ini tergolong moderat (tingkat premi saat ini 0,1% per semester atau 0,2% per tahun), karena berada di tengah-tengah rentang premi penjaminan kelompok negara-negara di dunia dalam kelas pendapatan yang sama dengan Indonesia. Tingkat premi tersebut cukup kondusif bagi perbankan Indonesia karena turut andil dalam memberikan cukup ruang bagi perbankan untuk memperbaiki tingkat kesehatan pasca krisis (NPL) dan memupuk modal dari laba (pendapatan bunga bersih) yang diperoleh untuk pengembangan usahanya.

Guna memenuhi kepastian hukum dan sebagai antisipasi bila di masa depan cadangan penjaminan kurang dari target 2,5% atau tidak mencukupi, LPS perlu segera

MAJALAH KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN

ISSN 1410-3249

Volume 13 Nomor 1, 2009

Keywords used are free terms. Abstracts can be reproduced without permission or charge.

ABSTRAKSI

mendorong pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksanaan di bawah UU yang mengatur mekanisme penyediaan bantuan pinjaman pemerintah dalam kondisi tidak memadainya atau tidak mencukupinya cadangan penjaminan.

Keyword : *Financial Safety Net*, LPS, *Ex Ante*, dan *Ex Post*.

TULISAN LEPAS : STABILITAS SISTEM KEUANGAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN NEGARA KESEJAHTERAAN

Oleh :
Muslimin B. Putra*)

*) Analis Kebijakan Publik pada CEPSIS Makassar
Email: musliminbputra@yahoo.com

1. PENDAHULUAN

Sejak 2007 ketika terjadi kasus *subprime mortgage* di Amerika Serikat dan melambungnya harga minyak dunia, otoritas moneter Indonesia optimis bahwa sistem kuangan pada masa depan memiliki prospek yang stabil dan terkendali. Bank Indonesia (BI) sebagai pemegang otoritas sistem keuangan optimis bahwa perbankan Indonesia memiliki ketahanan yang memadai terhadap berbagai goncangan akibat perubahan variabel makro-ekonomi seperti nilai tukar dan suku bunga akibat pengaruh eksternal. Pembentukan cadangan dan kuatnya permodalan perbankan diperkirakan dapat mencegah terjadinya instabilitas sistem keuangan. BI juga melihat korporasi besar yang mendapatkan pinjaman dalam bentuk valuta asing (dollar AS) memiliki ketahanan yang cukup kuat terhadap perubahan nilai tukar. Kemungkinan (probability of default) sekitar 75-an perusahaan yang memiliki rasio utang atas modal (debt equity ratio) diatas 100 persen dan utang valuta asong ditas 50 persen diperkirakan mengalami peningkatan.

Pada tahun 2007, BI melakukan perhitungan indeks stabilitas keuangan (financial stability index = FSI) pada akhir semester satu menurun menjadi 1,21 poin dibandingkan pada semester dua 2006 yang mencapai 1,37. Sedangkan pada semester dua 2007, FSI menurun menjadi 1,27 poin. Hal ini menunjukkan beberapa resiko pokok menunjukkan peningkatan yang dipengaruhi oleh nilai tukar, suku bunga dan harga Surat Utang Negara (SUN). Sedang resiko likuiditas tetap terjaga dengan kecenderungan menurun seiring dengan perbaikan kualitas manajemen resiko perbankan, meskipun resiko operasional perbankan masih menghadapi berbagai tantangan. Kondisi ini secara keseluruhan dimaknai sebagai prospek sektor keuangan yang tetap stabil dan terkendali.

Pengaruh eksternal terhadap stabilitas sistem keuangan saat ini adalah banyaknya dana dari pasar dunia yang mendorong peningkatan arus modal berjangka pendek yang masuk ke pasar Indonesia, potensi lonjakan harga minyak dunia, masih adanya dampak dari kasus *subprime mortgage*, serta adanya ketidakseimbangan global. Faktor tersebut dinilai memiliki pengaruh yang rendah terhadap kawasan Asia, termasuk Indonesia. Alasannya, hampir tidak ada perbankan ataupun lembaga keuangan yang berhubungan langsung dalam kasus *subprime mortgage* yang membuat pengaruh negatif kepada Indonesia. Dalam perspektif kawasan Asia, India dan Cina mengalami pertumbuhan ekonomi yang kuat, yang menyebabkan pertumbuhan perdagangan dalam kawasan mempengaruhi daya tahan sistem keuangan, disamping manajemen makro ekonomi yang kuat dan nilai tukar yang fleksibel. Diversifikasi pasar tujuan ekspor Indonesia juga membantu membatasi dampak dari penurunan permintaan barang dari Amerika Serikat (AS) akibat perlambatan ekonomi global.

Pada Sidang Kelompok Kerja *Bank for International Settlement* (*BIS Working Party*) ke-11 di Jakarta pada 5-6 Juni 2008, salah satu

kesimpulan adalah penilaian bahwa ketahanan ekonomi negara-negara Asia saat ini dalam menghadapi krisis telah jauh lebih baik. Membaiknya ketahanan ekonomi Asia tercermin dari semakin menguatnya neraca pembayaran, meningkatnya cadangan devisa, dan berkurangnya hutang luar negeri serta perkembangan pasar keuangan yang membaik (*financial deepening*). BIS juga menyarankan agar negara-negara Asia tetap menjaga stabilitas dalam menghadapi gejolak global yang muncul akibat meningkatnya harga-harga komoditas, makanan, maupun krisis keuangan di AS karena akan berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia dalam beberapa waktu ke depan yang mengakibatkan tingginya tekanan inflasi pada beberapa negara. BIS juga menyarankan kepada bank sentral anggotanya agar secara bijak menggunakan pilihan dan intrumen kebijakan moneter yang ada dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan, inflasi dan stabilitas sistem keuangan.

BIS Working Party ke-11 dihadiri 19 Bank Sentral sebagai otoritas moneter dari Asia Pasifik, Eropa, Amerika Latin, Australia dan Selandia Baru. BIS merupakan organisasi internasional bank sentral seluruh dunia yang mendorong kerjasama keuangan dan moneter diantara bank sentral. BIS juga berlaku sebagai bank untuk bank sentral-bank sentral di dunia. Sedang *BIS Working Party* adalah sebuah forum diskusi rutin yang diselenggarakan oleh BIS yang diselenggarakan di negara-negara anggota BIS.

Dampak putaran awal dari krisis AS terhadap perbankan dan industri keuangan domestik relatif kecil. Yang diwaspadai adalah dampak putaran kedua dan selanjutnya terhadap melemahnya ekspor ke AS, baik secara langsung maupun lewat negara perantara karena hal ini berpengaruh terhadap kinerja perusahaan eksportir Indonesia yang merupakan debitur perbankan. Kejadian bencana yang terjadi silih berganti berpotensi pula meningkatkan jumlah kredit bermasalah karena perputaran roda ekonomi akan mandeg. Kesemuanya diperkirakan menimbulkan tekanan terhadap ketahanan sistem keuangan pada semester pertama 2008, sehingga indeks stabilitas sistem keuangan sedikit meningkat menjadi 1,34 poin pada akhir Juni 2008.

Pengaruh eksternal lainnya adalah efektifitas langkah-langkah penyelesaian krisis *subprime mortgage* yang dilakukan otoritas moneter dan perbankan negara-negara terkait. Sedang pengaruh internal adalah kewaspadaan terhadap dampak persiapan menje;ang pemilu 2009 mendatang terhadap aktifitas bisnis dan resiko pada sektor keuangan karena terkait dengan faktor keamanan yang conderung tidak kondusif sehingga dapat mendorong terjadinya *capital outflow.*

Isu ketahanan ekonomi menjadi topik perhatian para otoritas moneter baik petinggi BI maupun otoritas moneter negara-negara Asia karena fenomena kasus *subprime mortgage* dan kenaikan harga minyak dunia. Pada pertemuan ke-27 Gubernur Bank Sentral se-Asia Pasifik (*South East Asian Central Banks* = SEACEN) dan Konferensi ke-43 yang berlangsung pada 21-23 Maret 2008 di Jakarta tema yang diangkat adalah *financial deepening to support monetary stability and sustainable economic growth.* Tema ini dipilih sebagai langkah fundamental yang harus diambil untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dalam menghadapi gejolak aliran modal yang sulit dihindari di tengah maraknya integrasi pasar keuangan dewasa ini. Upaya pendalaman pasar keuangan (*financial deepening*) diharapkan memiliki efek positif bagi pertumbuhan ekonomi, diversifikasi resiko dan peningkatan pasar, pengaruhnya pada aliran modal dan tekanan inflasi serta pengaruhnya pada formulasi kebijakan moneter. Pertemuan difokuskan pada bagaimana kondisi perkembangan terkini dari pasar keuangan di perekonomian SEACEN di tengah meningkatnya arus liberalisasi dan globalisasi, penguatan ketentuan kehati-hatian yang

dilakukan di pasar keuangan sehingga dampak positif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dapat terjadi dengan tetap memperhatikan stabilitas sistem keuangan dan mengukur dampak upaya pendalaman pasar keuangan pada kestabilan moneter, perumusan kebijakan moneter, dan *downside risk* pada aliran modal dan tekanan inflasi, serta *policy dilemma* yang dihadapi oleh otoritas moneter. Salah satu upaya yang dilakukan oleh SEACEN adalah kegiatan *economic surveillance* yang membantu kemampuan deteksi dini sehingga kebijakan *pre-emptive* bisa dilakukan. Menyadari semakin besarnya ancaman *contagion effect* dari negara tetangga maka kegiatan *surveillance* perlu dipertajam di tingkat kawasan.

Gubernur BI Burhanddin Abdullah dalam sambutan pengantar pertemuan mengatakan bahwa kerjasama antar bank sentral di kawasan seperti SEACEN merupakan piranti kebijakan yang penting bagi otoritas moneter dalam memperkuat upaya mempertahankan kestabilan makroekonomi. Dengan semakin tingginya tingkat integrasi global terutama di pasar keuangan, tidak bisa dipungkiri, bahwa meningkatkan ketahanan perekonomian domestik merupakan pilar utama untuk mengantisipasi gejolak eksternal yang terjadi.

Salah satu kesepakatan pertemuan SEACEN adalah pentingnya bank sentral melakukan fungsi pengawasan dan pengaturan yang kuat terhadap bank-bank. Para gubernur bank sentral anggota SEACEN mencermati bahwa pendalaman sektor keuangan di negara-negara anggota SEACEN ditandai oleh struktur yang semakin terdiversifikasi yakni berkembang dari sistem keuangan yang terpusat pada perbankan menjadi sistem keuangan berdasarkan pasar yang lebih canggih. Perkembangan tersebut diharapkan dapat terus berlanjut walaupun dalam turbulensi keuangan internasional sebagaimana yang terjadi dewasa ini. Lembaga-lembaga keuangan yang lebih kuat dan resiko yang semakin terdifersifikasi akan dapat memperkuat ketahanan ekonomi suatu negara terhadap gejolak. Para gubernur berpendapat bahwa pendalaman sektor keuangan harus dilakukan dengan urutan langkah-langkah (*sequencing*) yang tepat. Mereka menggarisbawahi adanya resiko ekses likuiditas dan kompleksitas yang berlebihan jika inisiatif pendalaman sektor keuangan dilakukan tanpa adanya kerangka kerja pengawasan yang memadai dan pengaturan yang kuat. Disiplin pasar, kaidah kehatian-hatian dan fungsi pengawasan dalam sektor keuangan sangatlah penting. Hanya, fleksibilitas tetap dibutuhkan untuk dapat mendorong inovasi dalam bidang keuangan, fungsi pengaturan yang lebih kuat, dana tata kelola perusahaan yang lebih baik. Para gubernur sepakat bahwa cakupan pengawasan yang ada harus lebih ditingkatkan, termasuk implementasi Basel II, penguatan-penguatan di berbagai bidang serta pengawasan secara terkonsolidasi yang mantap, juga memberi perhatian besar perlunya memperkuat pengawasan pasar keuangan guna meningkatkan kemampuannya dalam merespon gejolak secara tepat waktu serta kerjasama regional agar dapat mendorong perkembangan dan meningkatkan ketahanan pasar-pasar keuangan regional.

Selain kesepakatan diatas, para gubernur bank sentral SEACEN mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan akan melambat, seiring dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi di AS akibat berlanjutnya krisis *sub-prime*. Di wilayah Uni Eropa, pertumbuhan ekonomi tahun 2008-2009 diperkirakan juga akan melambat walaupun masih dalam laju yang moderat. Perkiraan ini diikuti pula oleh prospek inflasi yang lebih tinggi. Selama ini dapat dicermati bahwa dampak krisis keuangan di Amerika terhadap perekonomian Asia masih terbatas. Walaupun kawasan Asia akan mendapat imbas dari meningkatnya risiko dalam perekonomian global, dampaknya diperkirakan akan dapat diredam oleh permintaan domestik yang kuat dan peningkatan perdagangan antar negara di Asia.

Konferensi SEACEN ke-43 dan Pertemuan ke-27 dihadiri oleh para gubernur dan perwakilan dari 16 bank sentral anggota SEACEN dan dua bank sentral yang berstatus sebagai pengamat (*participating observers*) yaitu Laos (Bank of Laos PDR) dan Tonga (National Reserve Bank of Tonga). Keanggotaan South East Asian Central Banks (SEACEN) meliputi bank sentral dari sejumlah negara, antara lain: Brunei Darussalam (Kementerian Keuangan), Kamboja (National Bank of Cambodia), Fiji (Reserve Bank of Fiji), Indonesia (Bank Indonesia), Korea (The Bank of Korea), Malaysia (Bank Negara Malaysia), Mongolia (The Bank of Mongolia), Myanmar (Central Bank of Myanmar), Nepal (Nepal Rastra Bank), Papua New Guinea (Bank of Papua New Guinea), Filipina (Bangko Sentral Filipinas), Singapura (Monetary Authority of Singapore), Sri Lanka (Central Bank of Srilanka). Selain itu Taiwan (Central Bank of The Republic of China), Thailand (Bank of Thailand), dan Vietnam (State Bank of Vietnam). Selain itu, turut hadir Deputi Managing Director dan Direktur-Direktur Eksekutif dari Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund), Deputi General Manager dari *The Bank for International Settlements* (BIS), dan Direktur Eksekutif the SEACEN Centre.

2. STABILITAS SISTEM KEUANGAN

Kebijakan pemerintah dan visi pembangunan ekonomi jangka panjang kaitannya dengan sektor keuangan adalah bahwa pengembangan sektor keuangan diarahkan pada peningkatan kemampuan dalam pembiayaan kegiatan ekonomi dan peningkatan ketahanan terhadap gejolak yang melanda sektor keuangan dan perekonomian melalui penguatan kondisi internal industri jasa keuangan, penguatan sistem pengaturan yang efektif dan mampu mengantisipasi perkembangan pasar keuangan domestik dan internasional, penguatan sistem pengawasan perbankan yang independen dan efektif, penciptaan dan penguatan infrastruktur pendukung, serta perlindungan dan pemberdayaan nasabah.

Dalam rangka memperkuat stabilitas ekonomi, kerangka stabilitas sistem keuangan dibangun untuk meminimalisasikan terjadinya krisis, serta mengelola jika terjadi krisis. Kerangkanya antara lain mencakup pengaturan kewenangan lembaga/institusi yang bertindak sebagai penentu keadaan bagi satu lembaga keuangan termasuk atau diluar kategori yang menimbulkan kehancuran sistemik sistem keuangan, pilihan tindakan-tindakan penyelematan yang dapat dilakukan apabila sistem keuangan terancam krisis yang sistemik, serta pembagian peranan dari masing-masing lembaga terkait dalam pengawasan dan pengaturan sektor keuangan.

Pemilihan sistem nilai tukar mata uang dalam 20 tahun mendatang disesuaikan dengan gejolak eksternal dan kondisi ketahanan sistem keuangan dalam negeri. Dengan gejolak eksternal yang diperkirakan makin meningkat dan upaya pemantapan sistem keuangan yang masih harus ditingkatkan, sistem nilai tukar mengambang bebas dapat terus diterapkan. Bila gejolak eksternal yang mereda sementara ketahanan sistem keuangan telah mantap, yang didukung pula oleh stabilitas politik dan keamanan yang baik, dimungkinkan adanya perubahan sistem nilai tukar ke arah yang lebih tetap untuk mendorong kepastian di sektor riil.

Data BI per Desember 2007 dan dipublikasikan awal 2008 menunjukkan bahwa stabilitas sistem keuangan Indonesia tetap terjaga dengan baik meski mengalami tekanan resiko yang cukup memberatkan karena meningkatnya tekanan inflasi dan pertumbuhan ekonomi dunia yang lambat. Kondisi stabil didukung oleh permodalan perbankan yang kuat dan manajemen resiko yang cenderung membaik, investasi dan ekspor yang mulai menggeliat menjadi pertumbuhan ekonomi, serta sektor konsumsi yang menjadi penopang

perekonomian Indonesia, serta secara eksternal investor asing masih memiliki kepercayaan dan ketertarikan terhadap kondisi ekonomi dan instrumen investasi yang ditawarkan pemerintah Indonesia.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketahanan sistem keuangan kontemporer adalah penyelesaian restrukturisasi kredit, perbaikan manajemen resiko dan sistem informasi kredit, sinkronisasi antara upaya peningkatan fungsi intermediasi dengan upaya penurunan resiko kredit, pengembangan rencana kontijensi untuk mengurangi resiko operasional, peningkatan efektifitas pengendalian internal dan tata kelola usaha dan pelaksanaan konsolidasi perbankan serta implementasi Bassel II.

Bila pada semester dua 2007 BI optimis terhadap stabilitas sistem keuangan, lain halnya pada semester pertama 2008. BI mencatat beberapa sumber instabilitas yang bisa mempengaruhi sektor keuangan domestik dan mendorong peningkatan resiko sistem keuangan. Hal ini ditunjukkan dengan kenaikan indeks stabilitas keuangan dari 1,21 poin pada Juni 2007 menjadi 1,25 poin pada Desember 2007. Kondisi ini menyebabkan BI membuat perkiraan tongkat pengukur stabilitas sektor keuangan kembali meningkat menjadi 1,34 poin pada semester dua 2008.

Kajian BI masih memandang pengaruh lingkungan eksternal menjadi pemicu dan sumber utama instabilitas sistem keuangan, seperti kecenderungan peningkatan harga minyak dunia, masih berlebihnya likuiditas dunia yang mendorong peningkatan arus modal jangka pendek, masih tingginya kebergantungan terhadap perbankan, semakin terkonsentrasinya kredit kepada pembiayaan konsumen, berbagai kendala di sektor riil serta masih adanya ketidakseimbangan global. Berdasarkan kajian tersebut, BI memperkuat manajemen resiko perbankan, menguatkan infrastruktur keuangan, meningkatkan efektifitas pemantauan sistem keuangan seta mengkaji dan meningkatkan kedalaman sektor keuangan. BI kemudian menggunakan *financial deepening* untuk mengurangi kebergantungan kepada perbankan sehingga mendorong kegiatan usaha keuangan non-bank, memperbanyak alternatif instrumen keuangan dan meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap produk dan jasa keuangan.

Meski terdapat faktor-faktor yang dapat menjadi pemicu instabilitas, BI memandang kondisi tersebut dengan tetap optimis karena *outlook* stabilitas sistem keuangan diperkirakan masih akan terjaga dengan baik karena didukung hasil *stress test* BI yang menunjukkan perbankan tetap memiliki ketahanan terhadap guncangan akibat perubahan variabel makro ekonomi. Hasil *stress test* terhadap sejumlah korporasi besar yang mendapatkan pinjaman valuta asing menunjukkan bahwa korporasi tersebut relatif tahan terhadap gejolak resiko nilai tukar.

Hasil kajian Stabilitas Keuangan BI juga masih memandang bahwa resiko pasar akibat harga Surat Utang Negara (SUN) relatif masih terkendali meski masih rawan terhadap *sudden reversal* (pembalikan arah secara tiba-tiba). Kondisi ini disebabkan adanya kepercayaan diri seluruh pemegang SUN atas keseluruhan kondisi ekonomi, utamanya APBN disamping desain kebijakan moneter dan kebijakan makro ekonomi yang baik.

Tetapi meski optimis melihat kondisi stabilitas sistem keuangan, untuk mengatasi kemungkinan datangnya krisis moneter tetapi dibutuhkan adanya kebijakan pengaman sektor keuangan pada tingkat undang-undang (UU). Bila situasinya mendesak, kebijakan jaring pengaman sektor keuangan bisa dalam bentuk Perpu (peraturan pengganti undang-undang). Perpu ini menjadi protokol penyelesaian krisis finansial karena dalam masa krisis semuanya harus tetap terkoordinasi; tidak ada waktu untuk berdebat karena bila krisis datang tidak mengenal hitungan jam, bahkan dari menit ke menit, seperti yang terjadi pada krisis moneter 1998 lalu.

BI dan pemerintah (Departemen Keuangan) sejak 2007 lalu telah menyusun RUU Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK) untuk melakukan pengawasan yang efektif terhadap perbankan dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat dan untuk meningkatkan keamanan industri perbankan. Dalam RUU JPSK diatur bila terjadi *external shock*, BI mempunyai skim jaring pengamanan sektor keuangan, seperti apabila kekurangan likuiditas BI telah mempunyai Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP). Apabila FPJP tidak dapat mengatasi permasalahan, maka BI akan memberikan Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD) bagi bank-bank yang memenuhi kriteria secara sistemik. Jika FPD juga tidak dapat mengatasi masalah, maka Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan menjadi upaya terakhir dalam menjamin simpananan nasabah. UU JPSK akan menjamin permasalahan sektor keuangan dalam keadaan normal dan kondisi sektor keuangan tersebut tidak berada dalam tekanan dari luar (*external shock*), baik dari perekonomian maupun kondisi lain seperti bencana alam. RUU JPSK diharapkan memberikan efek pada kestabilan industri perbankan demi kepentingan masyarakat serta memberikan efesiensi dalam industri perbankan yang merupakan fokus bagi BI ke depan. Namun demikian, BI akan senantiasa menjaga stabilitas industri perbankan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan sehingga bank-bank di Indonesia mempunyai resiko yang rendah dan dapat beroperasi secara efisien yang pada akhirnya akan dapat menjalankan fungsinya yaitu memberikan kredit dengan suku bunga rendah.

Bayang-bayang krisis finansial 1998 silam sepertinya masih menjadi momok menakutkan bagi pemerintah dan BI sehingga keduanya bersinergi untuk membentuk Forum Stabilitas Sistem Keuangan yang diresmikan pada 29 Juni 2007 silam. Peresmian pembentukan Forum ketika itu dilangsungnya di Gedung Departemen Keuangan ditandai penandatangan Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, Gubernur BI, Burhanuddin Abdullah dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin Simpanan, Krisna Wijaya. Pembentukan forum sebagai tindak lanjut nota kesepakatan antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI Pasal 31 pada 17 Maret 2007 mengenai ketentuan dan tata cara pengambilan keputusan kesulitan keuangan bank yang berdampak sistemik, pemberian fasilitas pembiayaan darurat dan sumber pendanaan yang berasal dari APBN. Fungsi utama Forum ini adalah : pertama, menunjang tugas komite koordinasi yang dipimpin Menteri Keuangan dalam rangka pengambilan keputusan terhadap bank bermasalah yang tengarai bersifat sistemik; kedua, melakukan sinkronisasi peraturan perundangan di sektor keuangan; ketiga, penyiapan *macro early warning system* sektor keuangan terhadap permasalahan-permasalahan lembaga dalam sistem keuangan yang berpotensi sistemik.

Departemen Keuangan yang dipimpin oleh seorang Menteri Keuangan adalah departemen yang tugas utamanya melakukan pengelolaan kebijakan fiskal dan sektor keuangan dalam rangka menjaga stablitas ekonomi makro. Manajemen kebijakan fiskal dan sektor keuangan harus dijalankan secara transparan dan akuntabel dan diarahkan kepada upaya-upaya untuk menggerakkan dan menstabilkan perekonomian, bahkan diharapkan mampu memberikan dorongan bagi pengembangan ekonomi nasional. Karena itu Departemen ini dituntut untuk terus menerus meningkatkan kinerjanya melalui pelaksanaan reformasi birokrasi, reformasi peraturan perundang-undangan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana pendukungnya. Mengingat pentingnya stabilitas ekonomi makro bagi pencapaian pembangunan nasional yakni menciptakan dan memantapkan stabilitas ekonomi makro serta mencegah timbulnya

fluktuasi yang berlebihan didalam perekonomian. Stabilitas ekonomi makro masih rentan dari gejolak ekonomi karena ketergantungan pembiayaan APBN dari pinjaman luar negari dan Surat Berharga Negara (SBN) yang digunakan menutup defisit maupun pembayaran kembali pokok utang yang jatuh tempo masih sangat tinggi dan semakin besar dari waktu ke waktu. Sementara pada sisi penerimaan dari pajak masih jauh dari optimal dibandingkan potensi penerimaan yang tersedia. Tantangan utama Departemen ini adalah meningkatkan penerimaan Negara dan mengefektifkan belanja Negara dalam rangka menjaga kesinambungan fiskal.

Ancaman krisis finansial semakin menguat dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia. Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) yang berpusat di Paris, Prancis memprediksi pertumbuhan ekonomi pada 30 negara-negara yang tergabung dalam OECD akan melambat menjadi 1,8 persen pada 2008 dari proyeksi sebelumnya 2,3 persen. Publikasi OECD menyebutkan bahwa ekonomi AS hanya akan tumbuh 1,2 persen tahun 2008 dan 1,1 persen pada 2009, sedang pertumbuhan ekonomi di kawasan Eropa dan Jepang akan melambat hingga hanya 1,7 persen tahun ini. Penyebab melambatnya pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh faktor krisis pasar finansial, faktor melonjaknya harga minyak dunia dan harga komoditas serta melambatnya pasar perumahan di AS. Faktor tersebut mempersulit pada pengambil kebijakan dalam menentukan respon kebijakan yang tepat.

Menurut Rahmatullah Sjamsudin, seorang analis Keuangan BI, secara keseluruhan fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat. Meskipun agak melamban, Produk Domestik Bruto (PDB) dalam tahun ini diperkirakan tumbuh minimal 6,3%. Jadi tidak mengalami perlambatan sebagaimana yang dialami Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Tingginya inflasi diperkirakan tidak bersifat persisten, dan pada tahun 2009 diharapkan akan kembali berkisar 5%. Neraca pembayaran diperkirakan masih akan tetap surplus ditopang oleh kinerja ekspor. Komitmen untuk tidak menaikkan *administered prices* (harga komoditas yang diatur) merupakan hal yang melegakan dan menunjukkan pemerintah memahami dampak negatif penyesuaian *administered prices* terhadap pertumbuhan ekonomi. Memang banyak suara sumbang menyatakan kebijakan mempertahankan subsidi akan membuat ketahanan fiskal terganggu. Namun, jika sungguh-sungguh, banyak cara lain untuk mempertahankan ketahanan fiskal. Lagi pula sepanjang terkontrol dan bukan disebabkan oleh kebijakan yang salah arah, kenaikan defisit anggaran adalah hal biasa diberbagai negara (Investor Daily, 29/04/2008).

Demi stabilitas sistem keuangan 2009 mendatang, sepertinya BI akan tetap mengarahkan penjagaan stabilitas makroekonmi dan mengarahkan angka inflasi ke tingkat yang lebih rendah, baik berasal dari inflasi impor, inflasi administer atau murni dari interaksi penawaran dan permintaan. Dalam operasionalnya, BI akan merespon dengan kebijakan melalui penetapan suku bunga dan nilai tukar secara hati-hati, pun berbagai instrumen akan dimanfaatkan secara simultan dan fleksibel seperti kebijakan BI Rate, pengeloaan volatilitas nilai tukar, penyerapan likuiditas dan optimalisasi operasi pasar terbuka.

3. PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN

Seorang Sejarawan hubungan AS-Indonesia dari University of Maryland, AS, Brad Simpson mengatakan bahwa sejak Orde Baru dibawah kepemimpinan Soeharto, Indonesia pernah mengalami pertumbuhan ekonomi berkelanjutan berkat dukungan meningkatnya pendapatan dari minyak bumi dan dukungan Bank Dunia yang menunjuk pada angka-angka pertumbuhan sebagai bukti absah. Namun

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ala Orde Baru tidak mampu menutupi ketidakmerataan yang juga meningkat pesat karena jaringan luas militer dan bisnis yang dikontrol oleh negara, Soeharto dan para kroninya mengambil sebagian besar bagian dari pertumbuhan ekonomi itu bagi diri sendiri, sehingga kelompok anti korupsi Transparency International menjadikan Soeharto sebagai salah satu orang terkaya di dunia dan mungkin sebagai koruptor terbesar dalam sejarah.

Brad Simpson menilai, pada dekade 1990-an, meningkatnya ketidakmerataan ekonomi dan sosial dan tekanan keras atas para penentang/gerakan oposisi menggerogoti legitimasi Soeharto yang didasarkan atas janji stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Korupsi yang merajalela dan kurangnya transparansi dalam rezim Orde Baru ternyata juga menggoregoti stabilitas ekonomi, karena stabilitas mata uang dan ekspektasi para investor asing dibangun atas asumsi-asumsi yang mungkin sebagian besar fiktif. Krisis ekonomi Asia pada 1997 yang menghantam keras perekonomian Indonesia menyatukan dan memperkuat oposisi yang sebelumnya tercerai berai dan lemah. Gerakan massal dari para mahasiswa, pedagang kaki lima dan masyarakat miskin di perkotaan, muncul, mendesak Soeharto untuk turun tahta. Penarikan dukungan dari negara-negara barat khususnya Amerika Serikat, perselisihan dalam tubuh Angkatan Darat, dan aksi protes yang meluas, memaksa Soeharto mengundurkan diri di bulan Mei 1998 setelah 32 tahun bertahta. Akan tetapi sejak itu Soeharto tetap berhasil mencegah upaya masyarakat luas dan organisasi-organisasi pendukung demokrasi untuk membawanya ke hadapan pengadilan mempertanggunjawabkan korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia.

Pasca krisis ekonomi warisan Orde Baru, pemerintahan SBY berupaya belajar dari kisah sukses Thailand keluar dari krisis ekonomi dengan mengundang perdana menteri (PM) Thailand, Thaksin Shinawatra pada 2006 lalu. Saat krisis terjadi, semua negara Asia Tenggara (kecuali Malaysia) yang terkena dampak mengikuti paket bantuan IMF yakni melakukan pemulihan ekonomi dengan melakukan restrulturisasi utang dan penyehatan perbankan baik bank BUMN maupun swasta melalui privatisasi, penyehatan birokrasi pemerintahan dengan menekan defisit anggaran dan pencabutan subsidi serta langkah-langkah yang dapat mendukung terciptanya suasana kondusif terhadap proses liberalisasi perekonomian. Thailand pada saat krisis terjadi dipimpin oleh PM Chuan Leekpai yang sangat konsisten dengan paket-paket kebijakan yang dianjurkan IMF namun tidak mampu membawa Thailand keluar dari lingkaran krisis. Thaksin yang berlatar belakang pengusaha sukses kemudian terpilih menjadi pengganti Leekpai sejak Februari 2001. Kebijakan ekonomi Thaksin yang bertolak belakang dari resep ekonomi ala IMF kemudian berhasil membawa Thailand keluar dari krisis ekonomi sehingga terkenal istilah "Thaksinomics", meski Thaksin tidak anti-IMF.

Didin S Damanhuri menilai keberhasilan *Thaksinomics* karena: Pertama, kebijakan fiskal dan moneter yang agresif untuk mengembangkan UKM dilakukan bersamaan dengan menciptakan situasi kondusif untuk menarik investasi skala besar - baik dari perusahaan multinasional maupun nasional. Dengan *dual track* tersebut, Thailand mengakselerasi UKM – baik sebagai perusahaan yang mandiri maupun terkait dengan sistem subkontrak - dengan kegiatan usaha investor asing maupun nasional yang berorientasi ekspor. Thaksin juga banyak mengirim UKM belajar keluar negeri dan akses kepada permodalan perbankan dibuka lebar. Thaksin juga mendorong inovasi produksi dan manajemen UKM agar makin kompetitif. Kedua, mendorong pertumbuhan konsumsi, termasuk memberikan kredit perumahan murah dan bersubsidi bagi masyarakat miskin pedesaan. Thaksin berhasil menciptakan situasi kondusif bagi TAMC (Thailand Asset Manegement

Corporation, yang mirip BPPN di Indonesia) untuk merekstrukturisasi perusahaan-perusahaan bukan dengan pengambilalihan utang macetnya seperti dilakukan BPPN tapi lebih karena naiknya aset-aset perusahaan yang bergerak kembali akibat *demand* yang tumbuh dari naiknya pendapatan dan konsumsi masyarakat. Hal itu merupakan dampak keberhasilan mendongkrak UKM, pertanian dan pedesaan. Akibat lebih jauh, perbankan dapat menekan kredit bermasalah dari sebesar 68 persen menjadi 20 persen dan sedang diusahakan menjadi maksimal 3 persen. Dan Thailand akhirnya masuk ke jalur pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan yang pada gilirannya mampu memecahkan masalah kemiskinan dan penganggguran. Ketiga, memberikan ruang manuver yang luas pro-kebijakan yang membangkitkan ekonomi rakyat yang umumnya bertolak belakang dengan resep IMF yang menekankan kebijakan yang ketat, baik fiskal, moneter, maupun kredit dengan cara mempercepat pembayaran utang kepada IMF. Pada Juli 2003, pemerintahan Thaksin melunasi sisa utangnya pada IMF sebesar 4,8 miliar dolar AS. Keempat, reformasi BUMN dengan perbaikan manajemen untuk mendorong profitisasi dan kalau perlu swastanisasi untuk BUMN-BUMN yang kadung keropos, merugi, dan tak berpotensi bangkit. Dalam reformasi ini termasuk untuk perbankan dengan memperkuat permodalan dan daya saingnya. Sementara untuk swasta ditekankan memperbaiki manajemen dan menanggulangi kredit bermasalah mereka tanpa membebankan kepada pemerintah. Langkah merger bank-bank yang kurang daya saingnya juga ditempuh untuk menyehatkan dunia perbankan. Kelima, menyusul keberhasilan dalam pemulihan ekonomi nasionalnya, Thaksin kemudian mendorong Thailand dalam kerangka kerja sama perdagangan dengan negara-negara Asia sebagai langkah membawa Thailand berekspansi. Kemudian dilanjutkan dengan kerja sama perdagangan internasional secara lebih luas. Perlu dicatat, untuk produk agroindustri, sebelum krisis pun Thailand telah merajai pasar dunia untuk teknologi menengah dan sederhana (29 Desember 2005).

Presiden SBY dalam orasi Ilmiah perayaan Dies Natalis ke-50 Universitas Padjajaran, Bandung (12/9/2007) mengungkapkan bahwa visi Indonesia 10 tahun masa depan yaitu Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur pada 2025 dan menjadi kekuatan ekonomi besar di dunia pada 2030 dengan agenda mengurangi angka kemiskinan, penciptaan lapangan kerja dengan diikuti pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan ditunjang dengan sistem pemerintahan yang baik dan demokrasi yang harmonis antara seluruh elemen masyarakat.

Menurut Faisal Baasir, mantan anggota DPR yang membidangi masalah ekonomi, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan hanya dapat diwujudkan jika ada kemajuan teknologi dan peningkatan produkfitas. Bila Indonesia ingin mengejar ketertinggalannya mewujudkan negara industri baru (*newly industrializing cuntries*), maka harus mampu mengembangkan industri rekayasa (*engineering*) dan melakukan pendalaman industrinya agar pada waktunya tidak memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap impor teknologi. Indonesia memiliki sumber daya domestik yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan industri rekayasa. Apalagi Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk amat besar sehingga merupakan pasar potensial. Jika Indonesia terus tergantung pada industri impor maka tidak akan berhasil mewujudkan kemandirian nasional. Persoalannya, bagaimana para pengusaha dan industri rekayasa yang akan dibangun harus mampu melakukan pendalaman industri sehingga efisien dan memiliki tahapan yang jelas untuk menjadi industri yang mandiri sehingga tidak terus-menerus tergantung komponen impor. Artinya, komitmen penyelamatan dilaksanakan secara konsisten dengan memberi batas waktu, target serta sasaran yang harus dicapai. Selain itu, industri rekayasa memerlukan komponen yang

cukup banyak sehingga perkembangannya harus melibatkan pengusaha kecil dan menengah dalam negeri guna mendukung komponen itu. Sebuah industri akan berkembang efisien jika berhasil mengembangkan *subcontracting* dengan usaha kecil dan menengah. Artinya, industri yang ada memiliki keterkaitan dengan basis sumber daya domestik serta tidak menguras devisa, sebaliknya justru memberi pemasukan devisa.

Faisal Baasir menganjurkan tidak boleh mengulang kegagalan di masa lalu di mana kekuatan usaha tidak didukung efisiensi kemampuan manajerial serta penguasaan teknologi, tetapi memanfaatkan peluang rente ekonomi kebijakan industrial yang diciptakan pemerintah. Kegagalan dalam melakukan pendalaman industri, di antaranya disebabkan struktur dan insentif yang diberikan terhadap pengembangan teknologi tidak konsisten. Untuk itu, jika pengembangan industri rekayasa berkembang baik dan efisien, maka pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan akan dicapai. Sebab, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat diwujudkan jika ada kemajuan teknologi dan peningkatan produktivitas.

Syarat lain bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (*sustainable growth*) adalah kebijakan moneter yang ketat, diikuti dengan langkah-langkah konsolidasi fiskal dalam menjaga stabilitas ekonomi, selain kebijakan suku bunga yang relatif tinggi yang dapat mendorong penguatan kinerja pasar saham, nilai tukar rupaih dan penurunan tekanan inflasi. Stabilitas ekonomi yang cukup terjaga haruslah diakui telah dapat meningkatkan kepercayaan pelaku pasar. Kinerja investasi portofolio baik di pasar saham, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan Surat Utang Negara (SUN) mengalami peningkatan cukup signifikan. Meningkatnya kinerja pasar saham tercermin pada perkembangan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Jakarta (BEJ) yang terus mencatat angka tertinggi dalam sejarah dalam beberapa bulan terakhir.

Menurut catatan Departemen Keuangan (Depkeu), pada awal Mei 2006, IHSG telah menembus angka 1.500, tertinggi dalam sejarah. Peningkatan kinerja investasi portofolio tersebut secara langsung telah mendorong perbaikan kinerja neraca pembayaran khususnya pada neraca modal. Hal ini pada gilirannya diharapkan dapat semakin memperkuat posisi cadangan devisa. Posisi cadangan devisa ini pada akhir tahun 2006 mencapai sekitar US$41,5 miliar, lebih tinggi dari posisi cadangan devisa tahun 2005 sebesar US$34,7 miliar. Sejalan dengan membaiknya kinerja neraca pembayaran dan posisi cadangan devisa dalam tahun 2006, nilai tukar rupiah cenderung mengalami penguatan dibanding tahun sebelumnya dengan fluktuasi yang relatif terkendali. Hal ini pada gilirannya telah menyebabkan menurunnya tekanan inflasi dalam tahun 2006. Sampai dengan bulan Mei tahun 2006, laju inflasi baru mencapai sebesar 2,41 persen, lebih rendah dibanding laju inflasi pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 3,76 persen. Secara keseluruhan, dalam tahun 2006, laju inflasi dapat dikendalikan pada tingkat yang relatif rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Harapan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan mengalami kemajuan. Pemerintahan memberi harapan dengan menargetkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) rata-rata per tahun sebesar 6 persen. Meski pengeluaran publik sedikit anjlok, nampaknya sektor swasta dapat menjadi mesin pertumbuhan untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang diperkirakan membutuhkan anggaran antara US$ 75 hingga US$ 150 miliar dalam 5-10 tahun ke depan. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang menyediakan lapangan kerja bagi sekitar dua juta tenaga kerja baru setiap tahun dapat berperan dalam pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Perbankan yang menguasai lansekap

keuangan kini merupakan 80 persen dari aset keuangan karena didukung oleh kredit bermasalah (non-performing loans = NPL) lebih kecil, sementara rasio kecukupan modal (CAR) lebih tinggi sehingga bank-bank menguntungkan. Akses yang semakin luas terhadap Pasar modal serta lembaga-lembaga keuangan nonbank sangat penting dalam mendukung kebutuhan pembangunan jangka panjang Indonesia.

4. MENUJU NEGARA KESEJAHTERAAN

Dalam Seminar Internasional "Stabilitas Makro-ekonomi untuk Pertumbuhan Tinggi dan Tenaga Kerja" di Jimbaran Bali, (08/11/2003), Gubernur BI Burhanuddin Abdullah mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia menguat dalam lima tahun terakhir, persoalan kemiskinan, kesenjangan pendapatan, dan pengangguran masih menjadi tantangan besar. Perkiraan IMF menyebutkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di Asia Pasifik sebesar 8,5 persen pada tahun 2003, namun globalisasi telah menciptakan kesenjangan pada negara-negara berkembang, yang mendorong mereka menerapkan kebijakan yang berbeda dalam mencapai stabilitas makro-ekonomi. Masalah kemiskinan memang tidak berhubungan langsung dengan kebijakan moneter, namun persoalan kesinambungan pendapatan dapat terkait dengan stabilitas makro-ekonomi yang menjadi tugas bank sentral sebuah negara. Kebijakan moneter bisa berperan langsung dalam upaya meningkatkan sektor sosial dengan serius menjaga stabilitas harga. Kesenjangan pada sejumlah negara berkembang bisa dikurangi dengan perdagangan terbuka. Ini mendukung mandat menjaga stabilitas harga oleh bank sentral. Perlu untuk menjaga tingkat inflasi tidak terlalu jauh dengan negara mitra dagang.

Burhanuddin Abdullah menilai sumber daya alam yang besar bisa menjadi sektor utama yang bisa menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar. Stabilitas makro-ekonomi merupakan prasyarat utama bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi berkelanjutan demi mengurangi angka pengangguran, kemiskinan serta mencapai level kemakmuran yang lebih merata. Pertanyaannya, apakah kebijakan yang diambil bank sentral sudah sesuai dengan kebutuhan negara menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif secara sosial?

Pernyataan Gubernur BI ketika itu secara tidak langsung mengungkap peran Negara dalam mengorganisasi kesejahteraan bagi rakyatnya atau singkatnya perlunya diwujudkan Negara Kesejahteraan. Hall dan Soskice (dalam Triwibowo dan Bahagijo, 2006:11) menyebut Negara Kesejahteraan adalah adanya sistem kesejahteraan sebagai hak sosial warga yang harus diimbangi oleh dua hal yang saling terkait yaitu pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja penuh (*full employment*) sehingga negara harus menerapkan kebijakan ketenagakerjaan yang aktif untuk mendorong partisipasi penuh warga dalam pasar tenaga kerja.

4.1. Kebijakan *Pro-Poor* bagi Petani

Dalam rangka memberdayakan petani, PBB telah menetapkan tahun 2009 mendatang sebagai Tahun Internasional Serat Alami. Menurut Organisasi Makanan Dunia (FAO), resolusi PBB tersebut dapat membantu jutaan orang di seluruh dunia, diantaranya beberapa penduduk miskin di beberapa negara miskin yang bergantung pada produksi dan pengolahan serat alami sebagai mata pencaharian mereka. Serat alami berperan untuk keamanan pangan dan perkembangan ekonomi bagi para petani ini. Tahun Internasional Serat Alami diharapkan dapat meningkatkan kepedulian para konsumen akan serat alami serta memperkuat permintaan bagi produk-produk serat alami, memperbaiki mata pencaharian para petani yang menghasilkannya dan menguntungkan negara-negara yang mengekspornya. Pada saat yang bersamaan, promosi penggunaan serat alami

akan meningkatkan kualitas lingkungan. Bahan-bahan serat alami meliputi kapas, wol, *jute* (rami), *flax* (rami), sutra, *sisal* (serat karung), serabut kelapa dan masih banyak lainnya. Beberapa diantaranya diproduksi dari tanaman, lainnya dari hewan serta digunakan dalam pakaian dan barang-barang konsumen lainnya, seperti halnya dalam aplikasi industri.

Badan PBB untuk urusan Pangan dan Pertanian (FAO) menyebut bahwa Indonesia termasuk salah satu negara yang terancam rawan pangan dan berpendapatan rendah. Akibat krisis yang melanda Indonesia pada 1997 lalu, menempatkan 70 juta penduduk berada dibawah garis kemiskinan. Dampaknya adalah terjadi kemiskinan, kelaparan dan rawan pangan di seluruh negeri. Indonesia sebagai negara agraris yang memiliki jumlah penduduk miskin diperhadapkan pada dua masalah ketahanan pangan yakit ketahanan pangan wilayah dan ketahanan pangan rumah tangga. Ketahanan pangan wilayah tergambar dari aspek produksi pangan, sedangkan aspek ketahanan pangan rumah tangga ditunjukkan oleh kemampuan penduduk dalam mengakses dan mengonsumsi makanan sesuai syarat gizi untuk mencapai taraf hidup sehat. Salah satu bencana alam yang berdampak pada ketahanan pangan wilayah dan ketahanan pangan rumah tangga adalah bencana banjir Sungai Bengawan Solo yang menimpa secara langsung lahan petani di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Golongan miskin menghabiskan 75% pendapatan mereka untuk makanan, tapi hanya mampu mengonsumsi 70%-75% dari kebutuhan gizi harian minimum. Kelaparan mungkin tidak mudah dilihat, tapi kekurangan gizi meluas. Selain kekurangan makanan dan gizi, hampir 30% dari jumlah penduduk mengalami rawan pangan. Artinya, mereka secara berkala rawan terhadap perubahan harga bahan makanan karena sebagian besar pendapatan mereka sekarang dipakai untuk membeli makanan.

Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki potensi sangat besar. Namun ironisnya, kebutuhan bahan baku pangan seperti beras dan kedelai sangat tergantung dari pasokan bahan baku impor. Pemerintah Indonesia gagal karena membiarkan petani tradisional berhadapan langsung dengan pemain dan pasar global sehingga pertahanan produksi pertanian nasional hancur.

Tanah adalah aset penting dalam dunia pertanian dan ketahanan pangan. Namun, kepemilikan tanah sebagai pilar utama kegiatan produksi pertanian semakin lama semakin tidak sinkron dengan kebutuhan pada sektor pertanian. Kepemilikan tanah/lahan bagi petani semakin mengecil, hingga hanya rata 0,25 hektar rata-rata kepemilikan lahan di Jawa. Kondisi ini disebabkan penciutan kepemilikan lahan yang bersumber dari pola warisan yang membuat lahan terbagi-bagi, disamping infiltrasi sektor industri/jasa yang mengeruk tanah yang besar serta kebijakan publik pemerintah yang mulai meninggalkan sektor pertanian.

Berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional (BPN), setiap lima tahun terjadi konversi lahan pertanian untuk pemanfaatan lain seperti industri, jasa atau permukiman yang mencapai 106 ribu hektar disamping infrastruktur pertanian yang kurang mendukung dan jauh dari memadai seperti saluran irigasi serta ancaman kekurangan air yang akan terjadi di Pulau Jawa. Cadangan air di Pulau Jawa tinggal 4 persen cadangan stok nasional akibat wilayah resapan air yang semakin menyempit. Pulau Jawa didiami 65 persen penduduk Indonesia. Akibatnya produksi komoditas pertanian merosot tajam.

Akibat kondisi tersebut WALHI pernah merekomendasikan kepada pemerintah agar menetapkan kebijakan sistem keuangan yang memihak petani, termasuk kebijakan pengaturan perdagangan yang melindungi petani lokal melalui kebijakan tarif dan non-tarif yang dinamin, memperkuat keterampilan petani lokal dalam teknik bercocok tanam, teknologi, benih, pengairan, penyuluhan, dan kredit bagi petani. Selain itu, WALHI juga merekomendasikan penyiapan (membangun

dan memperbaiki) infrastruktur yang mumpuni guna pemerataan hasil-hasil pertanian ke seluruh wilayah di Indonesia. Infrastruktur pertanian merupakan syarat mutlak dalam mendukung pembangunan pertanian.

Sebagai perbandingan, di Jepang selalu dilakukan survei infrastruktur untuk menjamin kelancaran distribusi produk pertanian. Perbaikan insfrastruktur selalu dilakukan sehingga dapat mendukung penyaluran produk-produk pertanian setempat.

Untuk mendukung ketahanan pangan nasional, pemerintah dituntut untuk melakukan reformasi agraria. Bila kebijakan ini diambil, petani akan memiliki akses perseorangan, memiliki kebebasan dan lebih banyak pilihan serta petani akan bergairan bekerja, memacu produkfitas dan iklim kompetisi.

Nampaknya Pemerintah Indonesia (Departemen Pertanian) perlu belajar pada India dalam hal pemberdayaan petani. Di negara Asia Selatan itu, Menteri Pertanian setempat telah mengeluarkan peraturan baru yang bertujuan untuk melindungi varietas tanaman dan hak para petani. Hal ini merupakan bagian dari usaha guna mempercepat implementasi *Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act 2001*. Peraturan baru tersebut mulai berlaku secepatnya pada 7 Desember 2006 setelah pemberitahuan oleh Kementrian Pertanian melalui publikasi resmi. Regulasi baru ini menetapkan tugas-tugas dan yuridiksi pencatatan, memberikan kriteria serta pedoman detail untuk pencatatan varietas tanaman dan varietas turunan utama, mekanisme deposit benih dan juga menyediakan contoh formulir lamaran dan otorisasi.

4.2. Kebijakan Pengurangan Kemiskinan

Konstitusi tertinggi di Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan tanggung jawab negara dalam mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar (pasal 28 C), pelayanan kesehatan (Pasal 28 H), pelayanan pendidikan (Pasal 31) hingga pemberian jaminan sosial (Pasal 34). Namun dalam kenyataannya, kemiskinan masih menjadi problematika sosial karena upaya mensejahterterakan rakyat melalui target pertumbuhan ekonomi tidak berjalan linear karena pertumbuhan yang tinggi tidak disertai dengan pengawasan yang ketat terhadap anggaran negara, khususnya untuk belanja publik sehingga kebocoran anggaran negara banyak terjadi hampir pada semua sektor.

Kemiskinan ditandai oleh kurangnya akses untuk mendapatkan barang, jasa, aset dan peluang penting yang menjadi hak setiap orang. Setiap orang harus bebas dari rasa lapar, harus dapat hidup dalam damai, dan harus mempunyai akses untuk mendapatkan pendidikan dasar dan jasa-jasa layanan kesehatan primer. Keluarga-keluarga miskin butuh mempertahankan kelangsungan hidup mereka dengan cara bekerja dan mendapatkan imbalan secara wajar serta seharusnya mendapatkan perlindungan yang dibutuhkan terhadap guncangan-guncangan dari luar. Sebagai tambahan, perorangan maupun masyarakat juga miskin –dan cenderung terus miskin – apabila mereka tidak diberdayakan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan-keputusan yang mempengaruhi hidup mereka (ADB, 2000). Kemiskinan adalah suatu situasi atau kondisi yang dialami seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi (Bappenas, 2002). Sedang BPS membatasi kemiskinan sebagai kondisi seseorang yang hanya dapat memenuhi makannya kurang dari 2.100 kalori per kapita per hari.

Bila menggunakan parameter kemiskinan internasional pendapatan dibawah 1 dollar AS per hari, jumah penduduk miskin di Indonesia pada 1999 sebanyak 7,7 persen, sedang bila dibawah 2 dollar AS per hari sebanyak 55,3 persen dari total penduduk (World Bank, 2002). Sementara itu pada 2000, persentase jumlah penduduk yang hidup

dibawah 1 dollar AS per hari sebesar 7,2 persen, sedangkan dibawah 2 dollar AS per hari sebesar 55,4 persen (World Bank, 2003).

Berdasarkan *World Development Indicators* dari World Bank (2002), terlihat adanya kesenjangan yang sangat besar antar golongan pendapatan di Indonesia pada tahun 1999. Penduduk yang merupakan 10% terendah hanya mendapatkan 4% dari pendapatan dan golongan 20% terendah mendapat 9%. Sebaliknya golongan 20% tertinggi mendapatkan 41,1% dan golongan 10% tertinggi mendapatkan 26,7%. Data tahun 2000 justru memperlihatkan kondisi yang lebih buruk. Persentase pendapatan yang diperoleh golongan 10% dan 20% terendah mengalami penurunan. Sebaliknya, pendapatan yang diperoleh golongan 10% dan 20% tertinggi justru mengalami peningkatan. Perolehan masing-masing golongan adalah sebagai berikut. Golongan 10% terendah mendapat 3,6% dan golongan 20% terendah mendapat 8,4%. Sebaliknya golongan 20% tertinggi mendapat 43,3% dan golongan 10% tertinggi mendapat 28,5% (Iqrak Sulhin, 2007).

Bila dibandingkan dengan beberapa negara Asia Tenggara yang lain, kondisi pembangunan manusia Indonesia termasuk tertinggal. Indonesia jauh tertinggal dari Malaysia, Thailand dan Filipina. Berdasarkan Ranking Indeks Pembangunan Manusia (UNDP, 2006), posisi Indonesia (ranking 108) jauh di bawah Singapura (ranking 25), Brunei Darussalam (ranking 34), Malaysia (ranking 61), Thailand (ranking 74), Filipina (ranking 84). Posisi Indonesia sedikit lebih baik dari Vietnam (ranking 109) (Ibid.).

Asia Development Bank (ADB) pernah merekomendasikan sebuah strategi efektif untuk pengurangan kemiskinan yang harus mampu membantu terwujudnya pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang berpihak pada kaum miskin; pembangunan sosial yang menyeluruh; serta tata kelola yang baik. Ketiga tonggak ini membentuk sebuah kerangka bagi PRS dan bersifat saling terkait dan saling mendukung. Pengurangan kemiskinan yang berhasil membutuhkan kebijakan-kebijakan yang secara bersamaan memperkuat ketiga tonggak ini. Kepentingan relatif dari setiap tonggak akan tergantung dari keadaan-keadaan di suatu negara dalam suatu saat tertentu. Dalam kerangka tiga tonggak ini, intervensi-intervensi untuk pengurangan kemiskinan dapat bersifat jangka pendek (misalnya intervensi-intervensi untuk mempertahankan pelayanan dasar kepada kaum miskin); jangka menengah (misalnya intervensi-intervensi dengan sasaran tertentu); atau jangka panjang (seperti intervensi-intervensi yang membangun sumberdaya manusia, merangsang pertumbuhan yang berpihak kepada kaum miskin, dan mendorong perluasan sektor swasta).

Kebijakan pengurangan kemiskinan perlu dikaji ulang dari *resque* (penyelamatan) dan *recovery* (pemulihan) menjadi preventif dan stimulatif untuk menjamin pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan stabilitas ekonomi untuk tujuan kesejahteraan sosial. Program *resque* dan *recovery* yang pernah dilakukan adalah program jaring pengaman sosial (JPS), program reorientasi subsidi bahan bakar minyak (BBM), dan program penanggulangan dampak pengurangan subsidi energi (PPD-PSE).

Pada dasarnya, keterkaitan antara kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi bersifat *dual track*. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan permintaan akan tenaga kerja dan upah, sehingga dapat bermuara pada pengurangan kemiskinan. Upah tenaga kerja yang lebih baik akan menyebabkan meningkatnya produktiftas tenaga kerja sehingga berefek positif pada pertumbuhan ekonomi karena pertumbuhan yang tinggi akan memperbaiki tingkat pendapatan masyarakat serta menyebabkan peningkatan pengeluaran pemerintah untuk perbaikan prasarana sosial dan infrastruktur fisik. Untuk itu dibutuhkan kombinasi antara tata kelola makro ekonomi

yang reliabel dengan kebijakan ketenagakerjaan dalam rangka keberpihakan pada orang miskin.

Regulasi untuk lingkungan kondusif bagi sektor swasta karena sektor swasta diyakini sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi sehingga dapat dikatakan memiliki peran langsung dalam proses pengurangan kemiskinan. Selain sebagai penggerak pertumbuhan, sektor swasta juga dapat melakukan pengadaan pelayanan dasar dan pembangunan infrastruktur sosial dan infrastruktur fisik bagi masyarakat miskin. Pengadaan pelayanan dasar berupa infrastruktur fisik dapat memberikan kontribusi pengurangan kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung; secara langsung berupa penciptaan lapangan kerja, memperluas akses terhadap kegiatan perekonomian, dan pelayanan kebutuhan dasar, secara tidak langsung dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat memperluas prasarana fisik yang membuka peluang penyatuan pasar nasional dengan daerah, utamanya daerah yang kaya sumber daya alam.

Regulasi yang membuka peluang pendapatan bagi kaum perempuan dengan cara memperbaiki tingkat pendidikannya. Peningkatan tingkat pendidikan kaum perempua berkorelasi pada peningkatan sosio-ekonominya disertai pengurangan tingkat kematian ibu dan bayi, pengurangan tingkat kelahiran dan pengurangan biaya-biaya kesehatan. Banyaknya perempuan menderita kemiskinan karena tersingkir secara sistematis dari akses untuk mendapatkan peluang jasa-jasa layanan publik yang penting. Perempuan yang sejahtera dan berpartisipasi dalam bidang ekonomi akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

5. PENUTUP

Impian menuju negara kesejahteraan adalah impian akan terwujudnya kesejahterteraan rakyat secara umum melalui kebijakan pembangunan nasional yang didesaign secara inkremental dengan target komprehensif. Stabilitas sektor keuangan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan adalah salah satu parameter yang paling strategis mencapai impian tersebut. Sebagaimana disebut Espin Andersen, Negara Kesejahteraan pada dasarnya mengacu pada peran Negara yang aktif dalam mengelola dan mengorganisasi perekonomian yang didalamnya mencakup pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya. BI sebagai pemegang otoritas keuangan dapat menggunakan peran strategis tersebut demi kemaslahatan rakyat dan bangsa Indonesia.

Sebagai rekomendasi kebijakan diharapkan adanya regulasi yang menciptakan lingkungan kondusif untuk sektor swasta yang berkorelasi pada peningkatan ketenagakerjaan, regulasi yang membuka peluang menghasilkan pendapatan untuk kaum perempuan dan kelompok-kelompok marjinal (difable) yang seringkali tidak menjadi target kebijakan ekonomi secara umum, regulasi yang dapat membuka peluang-peluang dibidang *enterpreneurship*, dan regulasi yang menghindari peluang penghilangan segala intervensi yang dapat merusak pasar.

DAFTAR PUSTAKA

Asian Development Bank, 2005, *Meningkatkan Perjuangan Melawan Kemiskinan Di Asia dan Pasifik: Strategi Pengurangan Kemiskinan ADB*, Jakarta : ADB

Baasir, Faisal, 2007, "Restrukturisasi Industri dan Kemandirian Nasional", *Harian Kompas*,

BAPPENAS, 2002, *Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan : Sebuah* Gagasan, Jakarta: BAPPENAS

Bisnis Indonesia, "Indonesia butuh sektor *keuangan* yang lebih beragam", Kamis, 21 April 2005; "Pentingnya menjaga ekspektasi pasar", 31 Januari 2007

Damanhuri, Didin S., 2005, "*Thaksinomics* dan Saudagarnomics", *Kompas*, 29 Desember 2005

FAO, "Tahun Internasonal serta alami", 5 Januari 2007, http://www.fao.org/newsroom/en/news/2006/1000472/index.html

Kompas, "Ketahanan ekonomi Asia *membaik*", Jumat, 6 Juni 2008

Koran Tempo, "Berdamai dengan inflasi", 08 Juli 2004

Okezone, "BI Arahkan Stabilitas Ekonomi Makro 2009", Rabu, 27 Agustus 2008

Rahmatullah Sjamsudin, "10 Alasan Untuk Optimis", *Investor Daily*, 29 April 2008

Suara *Merdeka*, "Presiden SBY: Ekonomi Indonesia mulai bergerak", Senin, 25 September 2006

Sumedi dan Supadi,2004, *Kemiskinan di Indonesia : Suatu Fenomena Ekonomi*, ICASERD Working Paper No. 21, Puslitbang Sosek Pertanian, Balitbang Departemen Pertanian RI

Tempo Interaktif, "Pemerintah dan BI *Resmikan* Forum Stabilitas Sistem Keuangan", Jumat, 29 Juni 2007

Triwibowo, Darmawan dan Sugeng *Bahagijo*, 2006, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, Jakarta: LP3ES-Perkumpulan Prakarsa

UNDP, *2006*, Human Development Report